

# **PROSPEK RADIO TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA MULTIPLEKSING**

Penulis:  
**Ahmad Budiman**

**Judul**

Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Pengelola Multiplexing

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xvi + 130 ; Ukuran: 15,5 cm x 23cm

**ISBN: 978-623-92324-6-7**

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

**Penulis:**

Ahmad Budiman

**Penyelia Aksara:**

A.Muchaddam Fahham

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bekerja sama dengan:**

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650 Fax. 0341-588010

[www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com)

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

# **Kata Pengantar**

## **Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan**

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka buku dengan judul “Prospek Radio Televisi Republik Indonesia Sebagai Pengelola Multipleksing” telah diterbitkan. Buku ini ditulis oleh Ahmad Budiman, Peneliti Kepakaran Komunikasi Politik Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan.

Secara sistematis dan kritis, penulis memaparkan kondisi riil mengenai kondisi dan permasalahan penyelenggaraan penyiaran publik saat ini. Penulis selanjutnya memberikan gagasan tentang peleburan RRI dan TVRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang perintah untuk membuat rancangan undang-undang telah termuat dalam Program Legislasi Nasional 2014-2019. Penulis juga memaparkan kesiapan penyelenggaraan multipleksing dan prospek RTRI sebagai penyelenggara multipleksing. Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan buku ini berasal dari penelitian individu, pendamping kunjungan kerja spesifik dalam perumusan RUU RTRI, data dan informasi pada saat pembahasan RUU RTRI, serta analisis penulis mengenai prospek RTRI sebagai penyelenggara multipleksing.

Pada buku ini penulis menyimpulkan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik, memiliki prospek untuk melaksanakan digitalisasi penyiaran. Kekuatan dalam menyelenggarakan sistem jaringan di setiap wilayah NKRI, menjadikannya sebagai lembaga penyiaran yang cukup siap melaksanakan sistem penyiaran digital dalam perannya sebagai penyelenggara konten siaran digital sekaligus sebagai penyelenggara multipleksing.

Peleburan RRI dan TVRI yang perlu ditetapkan dalam undang-undang menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), jelas memiliki prospek yang jauh menguntungkan terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan multipleksing. Pada kedudukannya sebagai penyelenggara multipleksing juga harus dilakukan persiapan dengan cermat, terutama terkait dengan kemampuan teknis alat peralatan pemancar siaran. Kemampuan siaran untuk menjangkau seluruh wilayah NKRI, menjadi modal utama yang sangat menguntungkan bila digunakan dalam terminologi siaran digital teresterial berjaringan. Pada tulisan buku ini, penulis juga menyimpulkan:

- a. Satu pemancar RTRI akan berfungsi untuk memancarkan siaran televisi dan memancarkan siaran radio dengan kualitas pancarannya yang meng-*cover* dalam satu wilayah siar atau wilayah lain melalui SSJ antar wilayah siar dan seluruh wilayah NKRI melalui SSJ secara nasional.
- b. *Digital deviden* di setiap wilayah siar maupun secara nasional tentunya akan lebih maksimal di dapatkan negara, karena prospek RTRI sebagai penyelenggara multipleksing tidak hanya di ibukota provinsi tapi juga meliputi seluruh kabupaten kota di setiap provinsi.
- c. Prospek RTRI sebagai penyelenggara multipleksing juga sangat berarti kepada lembaga penyiaran swasta lokal. Lembaga penyiaran baru tinggal berkonsentrasi untuk memenuhi syarat administrasi yang meliputi modal dan kepemilikan, serta perencanaan program siaran untuk mengisi kanal yang disediakan oleh RTRI.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ahmad Budiman yang dengan tekun melakukan pendampingan RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang RTRI serta melakukan penelitian individu, dan kemudian menulisnya dalam bentuk buku ini. Kepada Bapak Suwandi Sumartias, Ph.D (Dosen Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung) yang untuk kedua kalinya bersedia menjadi penyunting buku penulis, sehingga dapat hadir di hadapan pembaca semua. Kami ucapkan terima kasih.

Kami menyadari buku ini juga masih mengandung kekurangan, baik dari sisi substansi maupun teknisnya. Untuk itu kami mohon dimaafkan dan mengharapkan lahirnya kritik dan saran dari pembaca semua. Akhirnya kami berharap, semoga penerbitan buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, September 2019  
Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian Dewan

**Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197111171998031004

# KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini berasal dari dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis melalui kegiatan penelitian individu, pembahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) di Komisi I DPR, pengumpulan data, serta kegiatan kunjungan kerja Komisi I DPR RI untuk RUU RTRI yang diikuti penulis, khususnya yang terkait dengan substansi prospek RTRI sebagai pengelola multipleksing.

Permasalahan besar dalam dunia penyiaran di Indonesia, memang masih fokus terhadap model migrasi digital sebagai bagian masalah dari digitalisasi penyiaran di tanah air. Walaupun masyarakat belum sepenuhnya mempermasalahkan fokus dimaksud. Dunia penyiaran-lah yang merasakan perlunya dilahirkan sebuah regulasi yang mengatur tata kehidupan penyiaran digital, termasuk juga mengatur soal model migrasi di dalamnya.

DPR bersama Pemerintah memang perlu segera melahirkan sebuah regulasi penggantian atas regulasi penyiaran yang ada selama ini. Regulasi penyiaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memang masih memandang penyiaran dalam lingkup penyiaran analog. Setidaknya hal ini tercermin dari definisi penyiaran, jasa penyiaran, sistem siaran berjaringan (SSJ), mekanisme ijin penyelenggaraan penyiaran, dan program siaran. Regulasi penyiaran ke depan adalah regulasi yang menjadi dasar hukum kuat bagi keseluruhan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yang basisnya berada pada penyiaran digital.

Definisi penyiaran harus bisa mengakomodir keseluruhan keuntungan yang bisa diperoleh dari pelaksanaan penyiaran digital pada masa kini dan masa yang akan datang. Dan bila definisinya sudah

tangguh, dampaknya akan terlihat pada lingkup jasa penyiaran, sistem penyiaran berjaringan, mekanisme perijinan penyiaran, postur kelembagaan penyiaran, tugas dan wewenang regulator penyiaran (baca: KPI), pola penyelenggaraan program siaran, dan teknologi penggunaan dan penyebarluasan frekuensi penyiaran.

Berbagai kesiapan perlu dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, meski regulasi penyiaran masih terus dimatangkan. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang selama ini dijalankan oleh RRI dan TVRI juga dituntut untuk berbenah diri, baik kedudukan hukum, karakter kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas program siaran, sarana dan prasana penyiaran, potensi pengembangan usaha, sumber pendapatan penyiaran, serta optimalisasi pengelolaan aset.

Penguatan RRI dan TVRI sebagai LPP berangkat dari amanat konstitusi, bahwa setiap masyarakat berhak untuk memperoleh dan mempergunakan informasi yang dibutuhkan baik langsung dan atau dengan mempergunakan berbagai media komunikasi. Untuk itu prospek penguatan LPP di Indonesia adalah dengan menghadirkan Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang dasar hukum kelembagaannya perlu di tetapkan dalam UU tersendiri. RTRI hadir untuk memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh dan mempergunakan informasi publik sebagaimana diamanatkan konstitusi; memberikan kepastian hukum RTRI merupakan lembaga negara penyelenggara penyiaran publik; penguatan karakter kelembagaan, sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas program siaran, sarana dan prasana penyiaran, potensi pengembangan usaha, sumber pendapatan penyiaran, serta pengelolaan aset.

RTRI memiliki prospek sebagai penyelenggara multipleksing, apapun pilihan model migrasinya. Menjadikan RTRI sebagai penyelenggara multipleksing, semakin menguatkan perwujudan hak masyarakat dalam memperoleh dan mempergunakan informasi publik melalui penyiaran digital di Indonesia. Ada banyak potensi keuntungan yang bisa diperoleh bagi RTRI sebagai penyelenggara multipleksing, baik bagi masyarakat,

negara, RTRI sebagai lembaga penyiaran publik, serta lembaga penyiaran swasta utamanya yang berada di tingkat lokal. Meski demikian prospek yang dimiliki RTRI juga harus dibarengi dengan pembenahan RRI dan TVRI sebagai LPP sedini mungkin. Transisi pengelolaan sistem kerja, program siaran, pengelolaan aset penyiaran dan tata kelola sumber daya manusia, perlu dilakukan menuju lahirnya RTRI sebagai lembaga negara penyelenggara penyiaran publik dan sebagai penyelenggara multipleksing di Indonesia.

Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Walaupun penulis menyadari, tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan. Semoga buku ini bisa menjadi salah satu bagian kecil dari upaya untuk mengembangkan penyiaran publik dan penyiaran digital di tanah air tercinta.

Jakarta, September 2019

**Ahmad Budiman**



# KATA PENGANTAR PENYUNTING

*Suwandi Sumartias, Ph.D*

Pakar Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung

*When a new technology has found its ideal role in the world, it becomes an active agent in increasing the options, choices, and possibilities of others. Our task is to encourage the development of each new invention toward this inherent good, to align it in the same direction that all life is headed. Technology wants what we want the same long list of merits we crave.*

(Kelly, 2011)

Melalui kutipan di atas, secara ringkas dikatakan bahwa ketika suatu teknologi baru telah menemukan peran idealnya di dunia, tentunya teknologi tersebut menjadi agen aktif dalam meningkatkan opsi, pilihan, dan berbagai kemungkinan lainnya. Tugas kita yakni mendorong pengembangan ke arah kebaikan dari penemuan baru tersebut, untuk menyelaraskannya ke arah yang sama dengan semua kehidupan. Teknologi menginginkan apa yang kita inginkan, seperti daftar panjang kebaikan/manfaat yang sama yang kita inginkan.

Demikian halnya, dengan kehadiran buku yang berjudul “Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Pengelola Multipleksing” yang ditulis Ahmad Budiman sebagai Peneliti Kepakaran Komunikasi Politik Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan, tentunya memberi angin segar dan pencerahan yang sangat bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan eksistensi dan prospek radio dan televisi di wilayah NKRI dengan segala potensi dan karakteristik yang luar biasa.

Dalam dinamika sosial kebangsaan, berbagai wacana dan diskusi telah dilakukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan keberadaan dan prospek lembaga penyiaran radio dan televisi Republik Indonesia. Termasuk lahirnya pemikiran baru mengenai dunia penyiaran di Indonesia di era reformasi. Kita pahami dengan lahirnya UU Penyiaran No. 32/2002 tentunya berdasarkan pemikiran bahwa frekuensi sebagai infrastruktur penyiaran adalah kekayaan negara yang sangat terbatas, sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Frekuensi tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang bagi kesejahteraan mereka seperti selama ini.

Prinsip frekuensi harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kemudian mendorong lahirnya konsep mengenai *diversity of ownership* dan *diversity of content*, yang selama ini banyak didengungkan oleh praktisi dan teoretisi penyiaran di tanah air. *Diversity of ownership* mengandung pengertian mengenai keberagaman kepemilikan radio/televisi, serta membuka kesempatan bagi banyak orang untuk berusaha dalam bidang media elektronika. Sementara *diversity of content* adalah konsekuensi dari keberagaman kepemilikan, yakni keberagaman isi siaran radio/televisi di Indonesia. Dengan demikian, para praktisi dan teoretisi penyiaran berhadapan bahwa regulasi penyiaran di masa depan akan menjadi lebih demokratis dan menghindarkan diri dari monopoli dan oligopoli penggunaan frekuensi penyiaran.

Semangat UU Penyiaran sangat jelas yaitu menumbuhkan media-media lokal. Semakin lokal cakupan penyebaran media maka *content* yang mereka sajikan akan semakin dekat dan aspiratif pula bagi masyarakat setempat. UU Penyiaran mengharapkan media itu dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosial kontrol, fungsi edukasi maupun fungsi hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang dilayaninya.

Pada halaman 12-13 dalam buku ini, dikatakan bahwa pada sistem digitalisasi penyiaran, satu frekuensi gelombang bisa dilalui 12 program televisi. Begitu juga halnya dengan radio yang berubah dari satu program menjadi

28 program tiap frekuensi. Hal ini akan menyebabkan munculnya banyak sekali stasiun televisi dan radio.

Dengan sistematika dan uraian yang jelas dalam buku ini, tentunya akan lebih mudah bagi para pembaca dalam menyimak dan membacanya. Buku ini terdiri dari 5 Bab. Bab I menguraikan tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik yang membahas tentang: Kebijakan; Kondisi dan Permasalahan tentang Penyelenggaraannya, khususnya di: 1) Kalimantan Barat; 2) Sumatera Barat; 3) Sumatera Selatan dan 4) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab II Apakah RTRI, dengan uraian tentang perkembangan a) Digitalisasi Televisi dan Radio; b) Pengelolaan Multipleksing; c) Radio Televisi Republik Indonesia dan d) Perbandingan di Negara Lain. Kemudian uraian tentang penyelenggaraan Multipleksing, disajikan dalam Bab III dengan Topik Kesiapan Penyelenggaraan Multipleksing, yang membahas: a) Kesiapan TVRI; b) Kesiapan RRI; c) Kesiapan LPSTV Lokal; d) Kesiapan LPS Radio Lokal dan e) Peranan KPID.

Pada Bab IV menguraikan tentang Prospek Penyelenggara Multipleksing, sub pembahasan tentang: a) Aspek Persiapan; b). Organisasi RTRI; c) Prospek Pengelolaan Kanal Digital; dan d) Prospek Kerjasama.

Sebagai penutup buku ini (Bab V), penulis menyadari bahwa digitalisasi penyiaran merupakan sebuah kewajiban, agar kualitas maupun kuantitas penyiaran di Indonesia dari masa ke masa akan terus meningkat. Migrasi dari analog ke digital memang memerlukan kesiapan yang matang dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga tersedianya UU Penyiaran yang baru yang dapat dijadikan landasan hukum dari proses migrasi tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, kehadiran buku tentu sangat bermanfaat untuk disimak, sehingga menambah wawasan bagi para pembaca. Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M. Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan. Sehingga kita

sepakat bahwa harapan akan terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara perlu penguatan *civil society*, sehingga publik berhak mendapatkan siaran yang lebih mencerdaskan, memperoleh informasi, pendidikan, budaya dan hiburan yang lebih bermakna bagi masyarakat secara luas. Semoga cepat terwujud.

Bandung, 8 Oktober 2019

**Suwandi Sumartias**

**Referensi:**

Kelly, K. (2011). Understanding technological evolution and diversity. *Futurist*, (April). Retrieved from [http://mdc.ltindia.com/library/mm\\_files/Understanding Technological Evolution and Diversity.pdf](http://mdc.ltindia.com/library/mm_files/Understanding%20Technological%20Evolution%20and%20Diversity.pdf)

# DAFTAR ISI

Pengantar Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan .....	iii
Kata Pengantar Penulis .....	vi
Kata Pengantar Penyunting .....	xi
Daftar Isi .....	xiii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Bagan .....	xvi
<b>BAB I PENYELENGGARAAN PENYIARAN PUBLIK .....</b>	<b>1</b>
A. Kebijakan Saat Ini .....	1
B. Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan Penyiaran Publik .....	5
1) Kalimantan Barat .....	7
2) Sumatera Barat .....	10
3) Sumatera Selatan .....	13
4) Daerah Istimewa Yogyakarta .....	14
<b>BAB II APAKAH ITU RTRI .....</b>	<b>17</b>
A. Digitalisasi Televisi dan Radio .....	17
B. Pengelolaan Multipleksing .....	20
C. Radio Televisi Republik Indonesia .....	24
D. Perbandingan di Negara Lain .....	30
<b>BAB III KESIAPAN PENYELENGGARAAN MULTIPLEKSING .....</b>	<b>56</b>
A. Kesiapan TVRI .....	56
B. Kesiapan RRI .....	64
C. Kesiapan LPS TV Lokal .....	68
D. Kesiapan LPS Radio Lokal .....	71
E. Peranan KPID .....	73

<b>BAB IV PROSPEK PENYELENGGARA</b>	
<b>MULTIPLEKSING .....</b>	<b>77</b>
A. Aspek Persiapan .....	77
B. Organisasi RTRI .....	84
C. Prospek Pengelolaan Kanal Digital .....	92
D. Prospek Kerjasama .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
Daftar Pustaka .....	119
Index .....	123
Profil Penulis .....	127

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tipe Program Acara .....	12
Tabel 2. Jangkauan Siaran RRI Palembang .....	14
Tabel 3. Pengukuran Jangkauan RRI Yogyakarta .....	15
Tabel 4. Model SDM RTRI .....	28
Tabel 5. Perbandingan Beberapa Program Televisi Publik .....	32
Tabel 6. Perbandingan LPP di Negara Lain .....	41
Tabel 7. Evaluasi Penggunaan Media Komunikasi dan Informasi Pembangunan Pedesaan Berdasarkan Pendekatan Metode Evaluasi CIPP .....	98
Tabel 8. Prospek Kanal Digital Siaran Pedesaan RRI Malang ....	105
Tabel 9. Uji Coba Siaran Digital MUX TVRI .....	110

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Multiplexer (mux) .....	21
Gambar 2. Konsep Jaringan Penyiaran .....	22
Gambar 3. Klasifikasi Layanan dan Aplikasi .....	22
Gambar 4. Sistem Jaringan DVB .....	23
Gambar 5. Kesiapan Penerima Siaran TV Digital .....	23
Gambar 6 Organisasi NHK .....	36
Gambar 7. Visi NHK .....	37
Gambar 8. Struktur ABC .....	39
Gambar 9. Struktur BBC .....	39
Gambar 10. Pemancar di TVRI Makawembeng Tondano Sulut ....	59
Gambar 11. Mux digital di Pemancar TVRI Makewembeng Tondano Sulut .....	59
Gambar 12. Kamera di studio TVRI Sulut .....	60
Gambar 13. Pemancar TVRI di Makewembeng Tondano Sulut dan Pemancar LPS .....	61
Gambar 14. Tampak Belakang Mixer Digital TVRI Kalsel .....	62
Gambar 15. Mux TVRI dan Mux LPS Lokal .....	63
Gambar 16. Parabola TVRI dan Parabola LPS Lokal .....	63
Gambar 17. Perkembangan Siaran Digital TVRI .....	78
Gambar 18. Indeks Kualitas Program Anak .....	108
Gambar 19. Indeks Kualitas Program Berita .....	108
Gambar 20. Indeks Kualitas Program Talkshow .....	109
Gambar 21. Indeks Kualitas Program Varietyshow .....	109



# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Amir Effendy Siregar, *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi Membangun Keberagaman*, Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia, 2014.
- Ahmad Budiman, *Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Jusak, *Teknologi Komunikasi Data Modern*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2013.
- Darmanto, *Determinisme Teknologi Versus Determinisme Isi Siaran*, dalam M. Rohanudin, *RRI Play Strategi Memenangkan Persaingan Global*, Jakarta: Penerbit Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- M Solehudin, *Teknologi Siaran Radio Era Millenium: Digital Radio Broadcating atau Webcasting*, dalam Ari R Maricar, *Paradigma Radio Siaran Era Indonesia Baru*, Surabaya: PRSSNI Jawa Timur.
- Ignatius Haryanto, *Jurnalisme Era Digital Tantangan Industri Media Abad 21*, Jakarta: Penerbit PT Kompas, 2014.
- Ary Shariar (ed), *Kajian Konvergensi Teknologi Informasi Komunikasi*, Jakarta: BPPT, 2011.
- Askurifai Baksin, *Jurnalistik televisi Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media, 2013.
- Rumah Perubahan LPP, *RUU RTRI dan Naskah Akademik Versi Publik*, Yogyakarta: Penerbit Rumah Perubahan LPP, 2018
- Susan Abbot, *Public Broadcasting's Place in International Media Development*, Washington: CIMA Publication, 2016

## Regulasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik

## Dokumen

Bahan Masukan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi DIY dengan tema Kesiapan RTRI sebagai Penyelenggara Multiplexser, tanggal 6-8 April 2017

Kabul Budiono, "Prospek TVRI sebagai Penyelenggara Multiplexser", disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Ahmad Budiman, Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.

Naskah Akademik RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia, 2016.

Laporan kunjungan kerja spesifik Panja RUU RTRI Komisi I DPR RI ke Kalimantan Barat 19-21 Januari 2017.

Laporan kunjungan kerja spesifik Panja RUU RTRI Komisi I DPR RI ke Sumatera Barat 19-21 Januari 2017.

Laporan kunjungan kerja spesifik Panja RUU RTRI Komisi I DPR RI ke Sumatera Selatan 19-21 Januari 2017.

Laporan kunjungan kerja spesifik Panja RUU RTRI Komisi I DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta 6-8 April 2017.

Nonot Harsono, Penyiaran TV Digital, disampaikan dalam rangka FGD Penelitian Individu Ahmad Budiman, Jakarta, 2 Mei 2017.

Wawancara dengan Sjamsurizal Kepsta TVRI Sulut, 16 Mei 2017

Wawancara dengan Dolfon Adam/Kasie Program Pengembangan Usaha TVRI Sulut dan InSumajwo/Kasubsie Program TVRI Sulut, 16 Mei 2017

Wawancara dengan Cris Rompas Kasie teknik TVRI Sulut, 16 Mei 2017

- Wawancara dengan Sukirman Kepsta TVRI Kalsel dan Supriadi Kasie Teknik TVRI Kalsel, 5-9-2017
- Wawancara dengan kepala Bidang Teknologi Media Baru (Robby Van Room/Kabid Teknologi Media Baru, Nurhadi/Kasie sarana parasana siaran atau studio, Jerry Mande/kasie transmisi) RRI Manado, 17 Mei 2017
- Wawancara dengan kabid Pemberitaan RRI Manado, Yuli, 17 Mei 2017
- Wawancara James Awang/Kabid, Anita Makawembang/kasie Pro 1, Nonce Tawang/kasie Pro 2. Grace Pieter/kasie Pro 4, Hankie Manopo/kasie program dan evaluasi siaran RRI Manado, 17 Mei 2017
- Wawancara Kepala Bidang Program Siaran, Khairil Anwar, Kasie Pro 2, Ratna Fauziah, Pengarah Acara Pro 4, Herry, 5-9-2017
- Wawancara dengan Ronald/Direktur Operasional Pasific TV 18 Mei 2017
- Wawancara dengan Syarifudin Direktur Duta TV Banjarmasin, 7-9-2017
- Wawancara dengan Alex Sasialang (GM Delta FM Manado) 18 Mei 2017
- Wawancara dengan Nirwana 99,2 FM Banjarmasin, Irfan Direktur Nirwana FM Banjarmasin (berjaringan lokal), 6-9-2017
- Wawancara dengan D. Olga Pelleng (Ketua KPID Sulut), Merlyn CP Watulangkow (Anggota KPID Sulut/Dosen FH Unsrat Manado, 19 Mei 2017
- Wawancara dengan Gufron Syahyar Gani, Komisioner KPID Kalsel bidang kelembagaan, 7-9-2017
- Bahan Laporan TVRI pada RDP Komisi I DPR RI 8 Frberuari 2017.
- Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan TVRI, 21 Januari 2019.
- Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan RRI, 22 Januari 2019.

**Laman**

Kominfo Hadapi Kendala Terapkan Digitalisasi Televisi, <http://id.beritasatu.com/home/kominfo-hadapi-kendala-terapkan-digitalisasi-televisi/128581>, diakses tanggal 23-4-2017

*Iwan Awaluddin Yusuf*, “Kelemahan Digitalisasi Penyiaran”, <https://bincangmedia.wordpress.com/tag/kelemahan-televisi-digital/>, diakses tanggal 4-3-2015

“*Kajian implementasi radio siaran digital di Indonesia*”, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No.2 (2015) 133-150, <http://online.bpostel.com/index.php/bpostel/article/viewFile/130203/151>, diakses tanggal 5-1-2016

**Surat Kabar**

Amir Effendi Siregar, “Mencari Model Penyiaran Publik dan Komersial”, KORAN TEMPO, 23 April 2012.

# Index

## A

ABC Advisory council 37  
Analog 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 21, 64,  
67, 69, 73, 74, 76, 81, 82,  
83, 93, 112, 118, 119, 120,  
121, 122  
Announcer Bureau 35  
ASO 73  
Australian Broadcasting  
Corporation 31

## B

Bandwidth 17, 80  
Bit rate 17, 19, 80  
Blank spot 15, 18, 81  
British Broadcasting Corporation 31  
Broadcast engineering  
department 35  
Broadcast technology 25

## C

Channel capacity 17, 80  
CIPP 101  
Cliff effect 18, 81  
Content Delivery Network 82  
Content service 25

Corporate planning department  
34

Cut off analog 7, 75

## D

DAB 15, 18, 19, 82, 83, 84  
Dewan Penyiaran Publik 85, 89,  
90

Digital deviden 6, 79, 114, 115

Digital expertise 7, 75

Digital minded 7, 75

Digitalisasi Penyiaran  
3, 18, 119, 122, 124

Digitalisasi penyiaran 3, 5, 6, 18,  
23, 56, 67, 69, 70, 72, 73,  
74, 77, 81, 82, 83, 93, 115,  
116, 117

Diversity of content 3

Diversity of ownership 3

DRM 15, 16, 19, 72, 83

Dual cast 9

## E

Employment model 25

## F

Finances sources 25

- FM 10, 14, 15, 16, 19, 65, 71, 72, 121
- Free to air tv 22, 111
- Frekuensi penyiaran 2, 114
- H
- HD 13, 17, 18, 21, 63, 68, 70, 80, 82, 93, 111
- Head editorial policy 38
- Head group audit 37
- I
- Independent supervisory bodies 26
- Interference 3, 114
- Internal Audit Bureau 35
- ISDB 19
- J
- Jaringan 1, 5, 6, 12, 20, 21, 30, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 78, 91, 94, 95, 103, 104, 111, 116, 117, 121
- K
- Kanal digital 5, 7, 74, 77, 93, 105, 112, 113, 115
- KIM 105
- Kompres 19, 20, 110, 111
- Konten 3, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 58, 61, 62, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 88, 93, 94, 95, 96, 102, 106, 113, 114, 115, 116
- KPID 73, 75, 76, 121
- L
- Lembaga negara 24, 25, 26, 77, 85, 86, 87, 88
- Local content 11
- Local station 35
- LPP 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 24, 26, 27, 41, 56, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 120
- LPPPM 3
- M
- Media Asset Management 82
- Multi mux 5
- Multiplexer 5, 7, 19, 75
- N
- National Public Radio 30, 32
- News commentators bureau 35
- News department 35
- NHK World department 35
- NRSC 19
- O
- Overseas Bureau 35
- P
- P3SPS 75, 76, 107, 115
- Pay tv 22, 111
- Pemancar 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 62, 69, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 111, 115, 116, 117, 118

- Prime time 68
- Program inspection bureau 35
- Program siaran 4, 40, 56, 58, 67, 69, 85, 88, 89, 91, 92, 107, 108, 113, 118
- Programming department 35
- Prolegnas 4
- Prospek 6, 7, 24, 28, 60, 85, 87, 97, 105, 108, 110, 116, 117, 118, 119
- Public Broadcasting Service 30
- Public domain 5
- Public Radio International 30
- R
- Radio on picture 9
- Ready to digital 12, 13
- Risk Management Committee 35
- RRI 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 32, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 83, 92, 93, 94, 96, 103, 104, 105, 106, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 124, 125
- RSPD 104
- RTRI 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 55, 58, 61, 75, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120
- S
- SDM 4, 7, 9, 10, 16, 28, 40, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 71, 74, 75, 76, 81, 84, 89, 111
- Self regulatory agencies 26
- Siaran pedesaan 97, 102, 103, 104, 105
- Simulcast 15, 16, 81, 83
- Single mux 5, 61, 62, 63, 72
- SSJ 116, 118
- Switcer 59, 68
- T
- The Executive Board 34
- Trade off fleksibel 19
- TVRI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 92, 96, 102, 103, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 124, 125
- U
- UHD 17, 18, 80, 93

UHF 12, 13, 78

UNESCO 24

V

Variety show 108, 110

VHF 9, 13, 78

Video on demand 16, 114

VTR 59

W

Website 12

Wilayah siar 2, 6, 8, 69, 77, 79,  
81, 92, 93, 95, 104, 107,  
110, 112, 115, 117, 118,  
119

World Radio and Television  
Council 31



# PROFIL PENULIS



**Drs. Ahmad Budiman, M. Pd**, Lahir di Jakarta, 22 April 1969. Memperoleh gelar sarjana bidang komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tahun 1993 dan Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (2004). Pernah menjadi tenaga peneliti pada Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Depdikbud tahun 1996. Sekarang adalah peneliti Bidang Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jabatan Peneliti: Peneliti Madya/ IV-b Bidang Komunikasi Politik.

## **Pengalaman Pekerjaan:**

Anggota Tim Asistensi dalam penyusunan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU Penyiaran (2000-2002), RUU tentang Rahasia Negara (2008), RUU tentang Perposan (2008), dan RUU tentang Partai Politik (2008), RUU Intelijen Negara (2010-2011), RUU Industri Pertahanan (2011), RUU Keterbukaan Informasi Publik (2005-2008), RUU Pornografi (2006), RUU Rahasia Negara (2006), RUU Penyiaran (2012-sekarang), RUU Radio Televisi Indonesia (2012-sekarang), RUU Hukum Disiplin Militer (2014), Tim Kehumasan Setjen DPR RI (2013-2014), Tim Asistensi Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawasan Intelijen Negara (2014).

## **Karya tulisan:**

Kontributor beberapa buku, antara lain Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum, dan Ekonomi (Penerbit: P3DI Setjen DPR RI, 2003); dan Sistem Politik Indonesia: Perubahan dan Keberlanjutan Kelembagaan Negara (Penerbit: P3DI Setjen DPR RI, 2005); Pemilu 2009 dan Konsolidasi

Demokrasi (Penerbit: P3DI Setjen DPR RI). Penelitian yang pernah dilakukan antara lain Pilkada di Kalimantan Barat (2007), Penyerapan dan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat oleh DPRD (kasus DPRD Provinsi Sumsel dan Sulut (2008), dan Strategi Komunikasi Parpol pada Kampanye Pemilu 2009 di Kota Medan Sumatera Utara (2009). Penulis buku Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik (2011), Penulis buku Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI (2012), Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran (2012), RRI dan TVRI sebagai Media Pemilu (2013), Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI (2013), Peningkatan Citra Bangsa Melalui Kemandirian Industri Pertahanan (2013), Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan informasi Publik di DPR RI (2013), Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas (2014), Optimalisasi Pengaduan Masyarakat Ke DPR Secara *On-line* (2015), Jaminan Kerahasiaan Informasi pada Pengembangan TIK di Daerah (2015), Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah (2016), Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Era Pemerintahan Elektronik (2016), Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran (2016), Dinamika Politik Pilkada Serentak (2017), Dinamika Pelaksanaan Urgensi Urusan Di Bidang Persandian Pemerintah Daerah (2017), Siber dan Pembangunan Demokrasi (2018), Demokratisasi Desa (2019), Evaluasi Pemilu Serentak (2019).

#### **Kegiatan Ilmiah:**

- Melakukan penelitian tim dan penelitian individu serta penelitian lintas kepakaran yang terkait dengan topik keterbukaan informasi publik, pemekaran daerah, kampanye partai politik, industri pertahanan, telekomunikasi, penataan penyiaran, lembaga penyiaran publik.
- Menjadi nara sumber pada seminar tentang keterbukaan informasi publik di DPRD Kota Pontianak

- Menjadi Nara Sumber pada seminar pengelolaan kehumasan di DPR RI
- Mengikuti kegiatan workshop pengelolaan kehumasan dalam Bakohumas
- Menjadi Nara Sumber dalam rangka pengelolaan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan kearsipan di DPR RI.
- Menjadi Nara Sumber dalam Diskusi mengenai pengembangan kelembagaan RRI dan TVRI.
- Menjadi Nara Sumber dalam Diskusi mengenai penyiaran dan digitalisasi penyiaran.
- Menjadi Nara Sumber dalam pendidikan mengenai manajemen persidangan di DPR RI.

Alamat e-mail: [a.budiman69@gmail.com](mailto:a.budiman69@gmail.com)

